

## DI BAWAH TEKANAN KAPITALISME PERKEBUNAN: PERTUMBUHAN DAN RADIKALISASISAREKAT RA'JAT TEGAL, 1923-1926

Wijanarto

Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Brebes

Alamat korespondensi: [wijansutrisno71@gmail.com](mailto:wijansutrisno71@gmail.com)

Diterima/ Received: 18 Februari 2016 ; Disetujui/ Accepted: 1 Agustus 2016

### Abstract

*Article examines directly growth in the process of radicalization there are several factors that are key influence. The one factor interrelated on radicalizing process was the existence of sugar industry in Tegal. It views on linkages between the sugar industry with the development of Sarekat Ra'jat (SR) and its influence indicators of radicalization process. It was part of the communist partij expansion. The development of SR shows suprisingly number of members. SR Tegal reached 5327 peoples as their members. The total membership evenly came from all areas, especially close to the sugar industry in Pangkah, Pagongan, Kemanglen, Adiwerna and Balapoelang. It was the main reason to make the Dutch government to striccht oversight the administrative and appled legal sanctions. The SR resistance was took-placed at Karangcegak in 1926, effected the undiscipline and sporadic resistance of the members. It made the Dutch government easy to suppress and acted tough. The trial rebellion conducted by SR in Karangcecek, but it was failed. However it was not effect the eagerness to re-against PKI in November 1926. The revolutionary in Tegal option was chosed as result.*

**Keywords:** kapitalisme perkebunan, radikalisasi, Sarekat Ra'jat.

---

### Abstrak

Artikel ini mencoba menelusuri penyebab munculnya radikalisasi di Tegal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Salah satu faktor yang saling terkait pada proses radikalisasi adalah keberadaan industri gula di Tegal. Hal ini dilihat dari hubungan antara industri gula dengan perkembangan Sarekat Ra'jat (SR) dan indikator yang memengaruhinya. Kondisi ini merupakan bagian dari ekspansi Partai Komunis Indonesia (PKI). Perkembangan SR secara mengejutkan menunjukkan jumlah pengikut yang cukup besar. sebanyak 5.327 orang tercatat sebagai anggota SR Tegal. Mereka berasal dari seluruh wilayah di Tegal, terutama mereka yang daerah asalnya dekat dengan industri gula di Pangkah, Pagongan, Kemanglen, Adiwerna dan Balapoelang. Hal ini kemudian menjadi alasan utama untuk membuat pemerintah Belanda semakin mengawasi aktivitas mereka dan menerapkan aturan administratif. Perlawanan SR terjadi di Karangcegak pada 1926 yang dilakukan dengan sporadis oleh para anggota. Hal itu membuat pemerintah Belanda mudah untuk menekan dan bertindak keras kepada mereka, tetapi pemberontakan tersebut gagal dilakukan. Namun demikian, dengan kegagalan itu tidak memengaruhi keinginan untuk kembali melawan PKI pada bulan November 1926. Perlawanan revolusioner yang kemudian dipilih menjadi model utamanya.

**Kata kunci:** kapitalisme perkebunan, radikalisasi, Sarekat Ra'jat.

## PENDAHULUAN

Memasuki abad XX, terjadi perubahan mendasar di tanah kolonial Hindia Belanda. Salah satunya adalah dampak kebijakan liberalisasi dan kapitalisme. Angin liberalisme terasakan pada bidang kebijakan ekonomi kolonial. Penerbitan dan penerapan Undang-Undang Agraria 9 April 1870 dan Dekrit Agraria 20 Juli 1870 mengakibatkan haluan kebijakan ekonomi di tanah Hindia Belanda mengalami perubahan. Hal ini sekaligus menjadi pertanda kemenangan kaum liberal dalam pengelolaan ekonomi.

Tekanan kuat kaum liberal kepada pemerintah Belanda dalam lahirnya reformasi agraria bukan tanpa sebab. Permintaan pasar dunia atas komoditas daerah tropis adalah sumbu penyebabnya. Kaum liberal menuntut dua hal atas keleluasaan penggunaan tanah. *Pertama*, mengakui sebagai hak milik mutlak (*eigendom*) orang Hindia Belanda atas tanah yang ditempatinya, sehingga memungkinkan proses pengalihan tanah melalui penjualan dan atau penyewaan tanah. *Kedua*, penetapan semua tanah yang tidak dapat dibuktikan bahwa hak tanah tersebut merupakan hak milik mutlak adalah tanah Negara, sehingga memberikan peluang bagi perusahaan partikelir untuk memperolehnya dalam bentuk sewa/kontrak panjang yang disebut *erfpacht* (Furnivall, 2000: 159-186).

Aturan dalam bidang agraria tersebut mengubah pola kepemilikan tanah yang bermuara pada sistem patronase (Moertono, 1968: 14) menjadi sistem kontraktual tanah oleh kalangan partikelir (baca pemodal) melalui sewa yang panjang. Dampaknya adalah terbukanya arus modal swasta di tanah Hindia Belanda. Liberalisasi ekonomi mendorong lahirnya kapitalisasi partikelir dengan menggunakan modal dan sistem kewirausahaan Eropa (van Zanden dan Marks, 2012: 147).

Kapitalisme perkebunan dengan pengelolaan swasta memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1)

berorientasi pada ekspor komoditas yang menjadi prioritas; (2) membutuhkan tanah luas yang tak terbatas atau tak dibatasi; (3) memiliki tenaga kerja sangat besar; (4) dikelola dengan cara ketat dalam birokrasi tersendiri; dan (5) birokrasi perkebunan besar tidak terjangkau oleh kontrak sosial, karena pada umumnya merupakan *enclave* yang terisolasi dari masyarakat (Madison dan Prince, 1989: 20-21 dan Wiradi, 2000).

Liberalisasi telah mengalihkan peran negara dengan peran pemodal swasta. Dampak ini terasakan pada sektor perkebunan. Investasi sektor perkebunan menjadi sektor yang diminati. Di Jawa arus modal perkebunan yang mengalami proses transformasi adalah perkebunan tebu dengan industri gulanya. Terjadi peningkatan jumlah pabrik gula di Jawa dan Madura dari tahun 1870 hingga 1895. Pada 1870 terdapat 97 pabrik gula dan pada 1895 meningkat menjadi 265 pabrik gula (Lucas, 1991: 6). Pesatnya jumlah pabrik gula yang berdiri diimbangi dengan eksploitasi tanah untuk keperluan penanaman tebu. Pada 1880 tercatat ada 7000 ha diperuntukkan bagi lahan tebu. Kemudian pada 1890 meningkat menjadi 57.375 ha lahan tebu (Simbolon, 1995: 133).

Di Keresidenan Pekalongan sendiri memasuki abad XX telah berdiri 15 pabrik gula (Lindblad, 2002: 181-209). Dari 15 pabrik gula, enam di antaranya berada di Tegal, yaitu Pangkah, Kemantran, Kemanglen, Pagongan, Dukuhwringin, dan Balapulung. Demikian halnya dengan ekspansi tanah. Pada akhir abad XIX hingga tahun 1930-an lahan yang diperuntukkan untuk tanaman tebu mencapai 31 % dari lahan pertanian sawah (Lucas, 1991).

Selain dukungan penyediaan tanah, juga dilakukan upaya penataan sistem irigasi. Kemampuan irigasi untuk areal tanaman tebu selama 1910 – 1925 mencapai 19.000 ha, jika dibanding sebelum tahun 1910 yang hanya mampu mengairi 11.000 ha areal perkebunan tebu. Data tersebut tertera dalam laporan Residen

Pekalongan Jasper tanggal 3 Juni 1926 (Arsipnas, 1973: 32-33).

Upaya peningkatan irigasi dibahas kembali yang melibatkan pengusaha pabrik dengan Dinas Pengairan. Rencananya upaya peningkatan irigasi dilakukan dengan pembuatan waduk sekunder di Kumisik dan Rambut, yang terdiri dari 20 waduk sekunder dan dua waduk tirta di Kumisik, sembilan waduk sekunder di Rambut, serta satu waduk di Gung. Biaya pembangunan waduk mencapai angka f. 2.833.000. Keseluruhan biaya tersebut ditanggung *renteng* oleh pihak pabrik gula di Tegal dan Brebes seperti Pangkah, Pagongan, dan Adiwerna. Sementara itu, yang di Brebes adalah Ketanggoengan, Banjaratma, dan Jatibarang (Arsipnas, 1973: 23). Dengan pembuatan waduk-waduk itu diharapkan ada peningkatan kapasitas areal tanaman tebu seluas 11.000 *bau*.

Munculnya kapitalisme perkebunan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi di lapangan. Walaupun liberalisasi telah meminggirkan peran negara dan dikelola secara profesional oleh korporasi swasta, namun dalam beberapa hal terdapat praktik-praktik seperti periode *cultuurstelsel*. Pola inilah yang menurut Knight, bahwa industri gula mampu mempertahankan posisi kompetitifnya melalui paksaan ekstra-ekonomis (Linblad, 2002). Pola paksaan itu tercermin dari progresivitas kalangan pengusaha gula dalam mengeksploitasi lahan tebu. Para industrialis gula tetap memanfaatkan birokrasi pribumi dalam pengadaan areal lahan guna penanaman tebu. Birokrasi desa tetap menjadi ujung tombak tidak hanya dalam eksploitasi lahan, tetapi juga difungsikan dalam rekrutmen tenaga kerja.

Tidak mengherankan apabila hal ini memunculkan konflik dalam permasalahan eksploitasi lahan, terutama terkait dengan beban pajak seperti pajak pendapatan tanah (*landrante*) dan pajak irigasi. Sebuah laporan yang ditulis *Neratja* menyebutkan, bahwa di daerah Adiwerna Tegal, para petani mengeluhkan pungutan pajak

sewa tanah keperluan penanaman tebu sebesar 17 % (*Neratja*, 23 November 1918). Laporan tersebut juga mengungkapkan kasus lainnya seperti keluhan petani yang telah membayar pajak dan biaya penggarapan lahan masih harus dibebani dengan pajak lainnya. Sementara itu, sewa tanah rata-rata dalam satu panen pada titik terendah.

Kesenjangan dalam soal ini dipicu oleh patokan sewa tanah yang ditetapkan bukan pada nilai tanah yang disesuaikan dengan harga gula di pasar internasional, tetapi berdasar pada pendapatan bersih dari panen padi atau palawija (Gelderen, 1961: 154). Kondisi yang dialami petani berbeda dari kepala desa yang mendapatkan premi, karena berhasil mengubah tanah sawah desa menjadi lahan tebu. Pada 1918 pemberian premi dari pengusaha gula mencapai f. 2,50 (*Sinar Hindia*, 5 Mei 1918 dan Soe Hok Gie, 1990 : 8).

Keresahan sosial pun mengemuka dari faktor kesenjangan ini. Ada beberapa analisis yang menjadi pendorong keresahan sosial ini. Elson (1994:151) menyebutnya sebagai intrusi ekonomi Barat. Intrusi lebih diartikan sebagai pengacauan, intervensi atau gangguan (Echool dan Shadily, 2005: 329). Indikasi intrusi Barat antara lain: (1) ekspansi pengusaha gula terhadap industri gula mengakibatkan banyaknya jumlah pengusaha gula dan luasnya areal perkebunan dan (2) munculnya sejumlah regulasi baru yang berkaitan dengan liberalisasi pengusaha gula partikelir untuk membuat sewa kontrak tanah secara langsung dengan penduduk pribumi (Elson, 1994: 151 dan Bloembergen, 2011: 40).

Keresahan sosial yang menyeruak dan menakutkan bagi pengusaha gula ialah pembakaran ladang tebu. Terbakarnya ladang tebu bukan hanya faktor cuaca, namun lebih disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kapitalisme perkebunan. Pada 1911 Residen Pekalongan M. Van Geuns memublikasikan data soal pembakaran tebu di wilayah Keresidenan Pekalongan, dengan judul *Het Rietbrandenvraagstuk in Pekalongan*. Kasus pembakaran dan keresahan sosial di industri gula

inilah yang disebut sebagai *Pekalongansche Vendetta*. Dari hasil rekapitulasi pembakaran ladang tebu yang terjadi pada 1910-1911 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Rekapitulasi Pembakaran Ladang Tebu Keresidenan Pekalongan 1910-1911**

Tahun	Wilayah Perkebunan Pabri Gula	Kasus Pembakaran
1910	Kalimati	3
	Tirto	7
	Wonopringgo	2
	Sragi	1
	Tjomal	15
	Banjardawa	3
	Pagongan	19
	Kemantran	7
	Adiwarna	5
	Balapoelang	5
	Doekoewringin	-
	Djatibarang	2
	Kemanglen	5
	Pangkah	6
Ketanggoengan Barat	-	
1911	Kalimati	2
	Tirto	17
	Wonopringgo	23
	Sragi	8
	Tjomal	19
	Banjardawa	3
	Pagongan	5
	Kemantran	3
	Adiwarna	4
	Balapoelang	3
	Doekoewringin	-
	Djatibarang	7
	Kemanglen	4
	Pangkah	7
Ketanggoengan Barat	20	

Sumber : van Geuns, *Het Rietbrandenvraagstuk in Pekalongan*, 1911: 5.

Laporan van Geuns juga mengungkapkan, bahwa aksi pembakaran ditunggangi aksi kriminal yang diorganisasi oleh kelompok *bajingan* yang

memanfaatkan keresahan sosial tersebut (van Geuns, 1911: 7). Keresahan sosial yang meningkat dalam lingkungan perkebunan menjadikan seorang pengusaha gula memasang iklan pada koran *Soerabajasch Handelsblad*, 15 Juli 1913 tentang rekrutmen opsir militer yang berkemampuan untuk menanggulangi masalah ini (Mcvey, 2010: 11). Hal seperti ini juga terjadi di Keresidenan Pekalongan. Pada 18 Februari 1919 atas inisiatif Residen Pekalongan digelar rapat untuk membahas pengamanan dan gangguan wilayah perkebunan. Pertemuan tersebut dihadiri Asisten Residen Tegal, Asisten Residen Brebes, dan sejumlah administrator pabrik gula Kemantran, Pangkah, Kemanglen, Doekoewringin, Balapoelang, Djatibarang, Pagongan, dan Adiwarna (*Notulen van vergadering gehouden op den 18-en Februari 1919*: 1).

Rapat pertemuan tersebut juga membahas masalah keamanan yang diminta pihak pengusaha gula, pola rekrutmen petugas pengamanan, pembagian tugas dan koordinasi antara pihak kepolisian dengan pihak pengusaha gula. Persoalan anggaran juga menjadi fokus pembicaraan dalam rapat tersebut (*Notulen 18-en Februari 1919*: 8-10).

Tak berhenti dengan pembakaran ladang tebu, ruang-ruang perlawanan terhadap keberadaan industri gula dilakukan oleh kalangan pergerakan nasional. Dengan demikian, problem keresahan sosial telah menyentuh sisi politis yang dimainkan pergerakan nasional, salah satunya adalah Sarekat Ra'jat (SR).

Ideologi dan gerakan politik merupakan alat perjuangan bagi perlawanan terhadap kolonial. Ia lahir menjelma sebagai kesadaran baru melalui bentuk bahasa moderen surat kabar, pembentukan sarekat-sarekat, rapat-rapat, pemogokan hingga ruang pertunjukan sandiwara (Shiraishi, 2010: x-xiii). SR sebagai anak zaman pergerakan nasional, memiliki peran penting dalam menumbuhkan proses radikalisasi dan perlawanan.

Artikel ini mencoba merekonstruksi sisi pertumbuhan dan radikalisme SR Tegal dari tahun 1923 hingga 1926. Dengan latar belakang lahirnya kapitalisme perkebunan di Tegal, artikel ini akan memfokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi proses radikalisme di tubuh SR Tegal.

## TEGAL DAN LAHIRNYA SAREKAT RA'JAT

SR Tegal berdiri dalam situasi Tegal bergerak ke arah modernisasi layaknya suatu wilayah yang terkena dampak urbanisasi dan industrialisasi. Pada abad XX Tegal telah menjelma menjadi wilayah yang memiliki pusat-pusat industri dan layanan jasa. Pada masa itu Tegal menjadi bagian dari wilayah Keresidenan Pekalongan melalui *Staatsblad* Nomor 170 Tahun 1905 tertanggal 28 Februari 1905.

Atas dasar perkembangan itu, pada 1906 bersama dengan wilayah lain di Jawa, pemerintah kolonial menetapkan Tegal sebagai *gementee* berdasar *Staatsblad* Nomor 123 tanggal 21 Februari 1906. Dengan demikian, di Tegal terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintahan *regentschaap* yang dipimpin Bupati dan pemerintahan *gementee* yang dipimpin *burgermeester*. Pemerintahan *gementee* didampingi oleh Dewan Kota (*gementeeraad*) yang berjumlah 13 orang. Susunan Dewan Kota terdiri dari delapan orang Eropa, satu golongan Timur Jauh, dan empat orang pribumi.

**Tabel 2. Susunan Gementeeraad Tegal 1906**

No.	Nama	Asal / Wakil
1.	H.A.C Boelman	Eropa
2.	D.W Brand	Eropa
3.	W.Flach	Eropa
4.	H.D Schouten	Eropa
5.	J.J Scheers	Eropa
6.	J.Schwantje	Eropa
7.	P.Marks	Eropa
8.	E.Plennywerth	Eropa

9.	Raden Ibnoe	Pribumi
10.	R.M Oetarjo	Pribumi
11.	Mas Ismail	Pribumi
12.	R.Sasrohadikoesoemo	Pribumi
13.	Khouw Tjik Hak	Timur Jauh

Sumber :*Staatsblad* Nomor 123 Tahun 1906 artikel 6.

Terpilih sebagai *burgermestee* pertama di Tegal adalah pensiunan Mayor KNIL, D.J. Spanjaard. Sementara itu, pemerintahan *regentschaap* dipimpin Bupati trah Reksonegoro.

Sarana prasarana yang mendukung layaknya kota di Tegal telah terbentuk sejak awal abad XX, seperti pendirian perusahaan listrik Aniem (1915), perusahaan air minum (1932), pabrik besi baja NV *Tegal Machine Fabriek Braat* (1915), instalasi air minum (1932), jasa perbankan (1914), dan kantor pos dan telegraf (1900) (Daryono, 2008: 39-40 dan Alamsyah, 2003: 142). Sarana prasarana terpenting adalah keberadaan pelabuhan Tegal. Pelabuhan Tegal telah lama dikenal semasa kekuasaan Mataram dan menjadi strategis terkait pada era *cultuurstelsel* dan kapitalisme perkebunan partikelir. Daya dukung pelabuhan Tegal secara geografis disebabkan factor-faktor sebagai berikut: (1) ombak yang bersahabat dan memungkinkan kapal-kapal berlabuh, (2) tidak adanya batu karang dalam perairan sekitar pelabuhan, dan (3) letak pelabuhan yang menghubungkan daerah *hinterland* melalui sungai Gung (Sulistiyono, 2009: 1).

Pesatnya industri gula berpengaruh terhadap infrastruktur transportasi kereta api. Rencana pembuatan jalan kereta api digagas pada 18 Januari 1882 dengan membuka jalur Tegal-Balapulang melalui Banjaran dan Slawi (Alamsyah, 2003: 136). Jalur tersebut akan menghubungkan wilayah Pangkah melalui Banjaran. Ini dimaksudkan untuk mempermudah pengangkutan transportasi komoditas gula dan hasil perkebunan lainnya melalui pelabuhan Tegal. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan gudang-gudang

penyimpanan hasil perkebunan dan gula di sekitar kompleks pelabuhan Tegal yang masih dapat dilihat sampai sekarang.

Sementara itu, dilihat dari unsur demografi, kawasan Keresidenan Pekalongan berdasar data bulan November 1920, tercatat ada 4.700 orang warga Eropa (*Neratja*, 30 Maret 1921). Ini berbeda dari data yang dirilis oleh Cribb (2000: 61) yang menyatakan, bahwa pada 1920 ada 3.217 warga Eropa tinggal di Keresidenan Pekalongan. Dari jumlah tersebut yang bermukim di Tegal mencapai 2.300 orang (Daryono, 2008: 50-52).

Selain memenuhi birokrasi kolonial, penduduk asal Eropa tersebut bekerja di sektor perkebunan dan wiraswasta. Dengan segala konsekuensi keberadaan penduduk Eropa, maka gaya hidup Eropa dikenal di Tegal. Di antaranya keberadaan *societeit Da Slamat* yang telah berdiri pada 1890 sebagai tempat *rendezvous* masyarakat Eropa sekaligus bertemunya kaum sosialita saat itu, di samping “gedung bola / kamar bola di lingkungan pabrik gula.

Tempat pemakaman khusus bagi warga Eropa (*kerkoff*) yang berada di Kelurahan Tegalsari, telah ada pada pertengahan abad XIX. Di *kerkoff* Tegalsari itu pula dimakamkan Residen Tegal Pieter van de Poel pada 1824.

Sarekat Ra'jat (SR) Tegal lahir dari situasi transformasi modernisasi yang menimbulkan perlawanan sebagai konsekuensi negatif kapitalisasi perkebunan serta pergolakan wilayah Tegal yang dinamis sebagai bagian dari kondisi *urban mobilization*.

Keberadaan industri di Tegal melahirkan kelas baru yakni kaum pekerja/ buruh, yang secara keseluruhan tidak bisa tertampung dalam profesi pekerjaan di sektor formal industri dengan jumlah penghasilan yang diharapkan. Ini menjadi masalah baru. Terlebih saat para buruh membentuk asosiasi pekerja yang memperjuangkan hak mereka dan kemudian berkembang sebagai gerakan politik untuk melawan ketidakadilan terhadap kapitalisasi

industri dan perkebunan sekaligus penetrasi kolonial dalam kehidupan masyarakat pribumi.

Di Tegal berdiri sarekat-sarekat buruh yang didasarkan atas spesifikasi pekerjaan mereka. Di antaranya adalah Sarekat Pegawai Pelaboehan Laoetan (SPPL) Tegal yang berdiri pada 1925, Sarekat Boeroeh Goela (SBG) pada 1924, Sarekat Boeroeh Tjistik yang anggotanya berasal dari pekerja firma *Drukkerij de Boer te Tegal*. Selain itu, terdapat juga Sarekat Boeroeh Bingkil dan Elektrik yang anggotanya pegawai pribumi perusahaan Aniem Tegal. Sebelumnya telah berdiri sarekat pekerja kereta api, *Vereniging Spoor Transweg Personeel* (VSTP) dan *Personeel Fabriek Bond* (PFB). VSTP Tegal berdiri pada 28 Juni 1918 yang dihadiri 250 orang (*Si Tetap*, Juni 1918). Masih di wilayah Tegal, VSTP berdiri pula di Proepoek 17 Juli 1920 (*Si Tetap*, Juli 1920).

Dari beberapa sarekat buruh yang berdiri, sebagian besar berhaluan kiri. Seperti SPPL merupakan sarekat pekerja pelabuhan yang dikendalikan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai hasil kesepakatan Konferensi Surabaya 20-21 Desember 1924 (Shiraishi, 1998: 433, Mailrapporten 143 / 1926: 14). Termasuk Sarekat Boeroeh Goela yang dikontrol PKI melalui Sekretariat Kelompok Boeroeh Indonesia Merah yang dipimpin Ali Archam (Shiraishi, 1998 : 435). Kelak saat pertumbuhan SR Tegal asosiasi buruh ini menjadi sayap pendukung.

Pada situasi itulah SR Tegal berdiri pada 1923. Jalan panjang terbentuknya SR Tegal dimulai dari bercerainya Sarekat Islam (SI). Kenapa? Karena dalam perkembangannya SR menjadi *onderbouw* PKI, termasuk SR Tegal. Dualisme keanggotaan dalam tubuh Sarekat Islam telah dijawab saat faksi kiri dalam tubuh SI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 4-6 Maret 1923 di Bandung dan Sukabumi. Kongres yang dihadiri oleh 13 cabang SI Merah dan 13 afiliasi sarekat buruh menghasilkan putusan pemisahan tegas antara kubu Islam dan kubu komunis (Mcvey, 2010: 283, Shiraishi, 1998: 327-

330). Kongres tersebut juga menandai akhir strategi *block within*, yang dibangun kubu kiri dalam tubuh SI. Secara sederhana strategi ini merupakan strategi organisasi komunis memasuki gerakan massa nasionalis untuk kemudian menjebaknya dari dalam (Mcvey, 2010: 135-186). Pemilihan SI ada beberapa alasan. *Pertama*, dari segi jumlah SI merupakan organisasi pergerakan yang memiliki anggota banyak. *Kedua*, meski mengambil nama Islam, tetapi SI tidak mendasarkan eksklusivisme keanggotaan, karena anggota SI heterogen dan terbuka. *Ketiga*, implementasi Komintern mengenai Pan Islamisme yang memandang potensi Islam sebagai agama yang mampu menggerakkan secara aktif semangat militansi berpolitik (Mcvey, 2010: 96-97). *Keempat*, persamaan dasar dan keberpihakan perjuangan SI dalam mengangkat permasalahan buruh dan ekspansi kapitalisme perkebunan.

Jauh sebelum pelaksanaan KLB SI Merah 1923, pada saat bersamaan di Bandung faksi komunis telah melakukan konsolidasi dan rekrutmen keanggotaan. Basis keanggotaan dilakukan melalui SI-SI Lokal yang memisahkan diri dari Central Sarekat Islam (CSI). SI-SI Lokal inilah yang berubah menjadi Sarekat Ra'jat. SR diperuntukkan bagi kader masyarakat bawah/basis masyarakat pedesaan (Soedjono, 2006: 20). Pada 1924 berdiri lid-lid SR di beberapa kota di Jawa dan Sumatra, seperti SR Buitenzorg / Bogor pada 18 Mei 1924 (*Sinar Hindia*, 3 Juli 1924), SR Ambarawa pada 29 Mei 1924 (*Sinar Hindia*, 18 Juni 1924), SR Brebes pada 1 Juni 1924 (*Sinar Hindia*, 21 Juni 1924), SR Poerwodadi pada 19 Juni 1924 (*Sinar Hindia*, 21 Juni 1924), SR Betawi pada 28 Juni 1924 (*Sinar Hindia*, 2 Juli 1924), dan SR Padang Panjang pada 18 Mei 1924 (*Sinar Hindia*, 5 Juni 1924).

Tentang kapan pendirian SR Tegal tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, pada 1924 organisasi ini mengalami awal perkembangan secara pesat. Dari laporan Residen Pekalongan Jasper (*Mailrapporten* 143/1926: 7), diketahui bahwa pada 1925 sudah berdiri ranting SR di 30

desa seluruh Tegal, seperti Debong Tengah, Sentanan, Kraton Kidul, Kraton Lor, Tegalsari, Kaoeman, Kedjambon, Mangoendipoeran, Mangkoekoesoeman, Randugoenting, Panggoeng, Kalimati, Pendjalan, Slawi, dan Balamoa. Selain di wilayah yang disebutkan, SR juga berkembang di Boemidjawa dan Jatinegara.

Laporan tersebut juga menyatakan, bahwa SR Tegal mendapatkan pengawasan dan bimbingan dari Pengurus PKI di Weltevreden Batavia. Pada 16 Mei 1925 berkunjung A. Moenthalib, Moenasiah dan Tjoen Wan. Selain pengurus PKI Batavia terdapat nama pengurus dan propagandis PKI Semarang Muhammad Sabur, Sodikin, dan Suprpto.

Jika merunut dinamika perkembangan, maka ada tiga fase terkait dengan SR Tegal, yaitu: 1. Fase Embrio Awal / Kelahiran (1923-1924), 2. Fase Pengembangan (1924-1925), dan 3. Fase Radikal (1925-1926).

### **Fase Embrio Awal/ Kelahiran**

Fase Kelahiran merupakan rintisan. Proses pembentukan SR di beberapa tempat dilakukan pada fase ini. SR Tegal berdiri tidak hanya di kantong-kantong daerah industri gula/ wilayah perkebunan, tetapi juga wilayah yang luput atau jauh dari pengaruh kapitalisme perkebunan. Sebagai contoh adalah wilayah Boemidjawa dan Jatinegara. Pembentukan SR di dua wilayah itu dilakukan oleh dua propagandis SR Tegal, yaitu Soedirman yang berprofesi sebagai guru dan Walmin Reksasiswaya (Nuh, 1962: 1).

Soedirman bergabung ke SR pada November 1925 dan dianggap membahayakan. Pemerintah kolonial memberikan peringatan terhadap aktivitasnya (*Mailrapporten* 143/1926: 7). Sementara itu, nama Walmin Reksasiswaya telah menjadi anggota PKI sekaligus Pengurus SR Tegal sejak 1923. Ia kemudian dibovendigulkan, di daerah Tanah Tinggi (Nuh, 1962: 1).

Di Balapoelang, gerakan SR setempat didirikan oleh orang yang menyebut dirinya

revolusioner (Mailrapporten 143/1926: 8-9). Ketiga orang itu masing-masing Toedino alias Poedjodarnito, Moestadjab, dan Kresan.

Jatinegara merupakan daerah yang memiliki anggota SR cukup banyak. Jika melihat kartu keanggotaan yang dikembalikan pasca-perlawanan Karangcegak 1926, ada 1396 orang terdaftar sebagai anggota SR Djatinegara (Mailrapporten, 427/1926: 35). Bahkan laporan Residen Pekalongan (Mailrapporten 143/1926: 8-9) menyebut, bahwa Djatinegara sebagai kantong basis kekuatan SR Tegal selain Slawi, Pangkah, dan Balapoelang.

**Tabel 3. Jumlah Keanggotaan SR Tegal**

No.	Distrik	Jumlah Keanggotaan
1.	Tegal	660
2.	Soeradadi	359
3.	Adiwarna	676
4.	Slawi	1.503
5.	Balapoelang	398
6.	Boemidjawa	12
7.	Pangkah	323
8.	Djatinegara	1.396

Sumber: *Mailrapporten 143/1926, hlm 8-9*

Keberadaan SR Djatinegara tak bisa dilepaskan dari peran Haji Moeklas dan Haji Machroef Iskak. Keduanya masih dipersatukan persaudaraan. Istri Haji Iskak adalah adik perempuan Haji Moeklas. Sementara itu, Haji Moeklas memperisteri adik Haji Iskak yang bernama Salamah (Lukman, 2014: 223).

Haji Moeklas dikenal sebagai guru agama bersama dengan Haji Iskak. Keduanya merupakan tokoh SR Djatinegara. Haji Moeklas nyaris disamakan dengan "haji Misbach"-nya Tegal. Sayangnya, Moeklas tidak meninggalkan jejak pemikiran seperti Haji Misbach. Pada perlawanan SR yang meletus pada 1926 keduanya ditangkap dan diasingkan ke Boven Digoel. Bahkan, Haji Moeklas dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda

hingga ke Cowra, Australia. Bersama dengan 500 tahanan politik Digoel, Haji Moeklas dievakuasi ke Negeri Kanguru mulai Maret 1943. Kekhawatiran mereka akan dipekerjakan Jepang menjadi alasan utama pemindahan (Poeze, 2012: 37-84).

### Fase Pengembangan (1924-1925)

Menjelang perlawanan SR Tegal 1926, daftar keanggotaan SR Tegal mencapai 5.327 orang. Dari beberapa distrik di Tegal, wilayah yang memiliki jumlah keanggotaan terbesar ialah Slawi (1503 anggota) dan Djatinegara (1396 anggota). Pengembangan organisasi SR didasarkan pada bagaimana melakukan rekrutmen anggota baru dan pola membangun kesadaran ideologis melalui para pemimpin yang berpengaruh.

Dari sisi jenis kelamin anggota SR Tegal didominasi oleh kaum laki-laki yakni 5.237 orang. Sementara itu, anggota perempuan berjumlah 90 orang. Suatu hal yang menarik adalah keanggotaan tidak hanya didominasi oleh unsur masyarakat pribumi. Ada 180 orang keturunan peranakan Tionghoa menjadi anggota SR Tegal (Mailrapporten 143/1926: 8-9).

Pola rekrutmen keanggotaan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggelar rapat terbuka (*openbare vergadering*) yang melibatkan pengurus dan propagandis. Dalam pertemuan tersebut diperdengarkan lagu *Internationale* atau *Darah Ra'jat* pada saat pembukaan dan penutup pertemuan (*Sinar Hindia*, 20 Juni 1924). Jumlah propagandis yang berpidato mencapai tiga hingga enam orang.

Semangat mengembangkan organisasi tergantung dari strategi yang dilaksanakan propagandis organisasi. Mereka bekerja dengan disiplin tinggi dan terorganisasi. Setiap hari Minggu dari pukul 09.00 hingga pukul 14.00 digelar rapat di kantor SR Tegal. Rapat itu dihadiri oleh pengurus dan kepengurusan di tingkat desa (Mailrapporten 397/1926: 10). Para propagandis turun ke desa untuk menyeleksi calon anggota

maupun anggota SR. Mereka menyambangi ke rumah sekadar bersilahturahim atau membahas isu-isu aktual sembari sarapan (*Mailrapporten* 397/1926: 10). Kegiatan *turba* (turun ke bawah) dari rumah ke rumah dimaksudkan untuk menghindari pengawasan aparat intelijen serta menghilangkan rasa takut bagi anggota yang tidak berani menghadiri pertemuan terbuka.

Cara-cara rekrutmen dan pengkaderan tidak selalu dilakukan secara terbuka dan massif. Ada proses pengkaderan melalui sel-sel tertutup. Setiap sel beranggotakan lima hingga 10 orang. Dari sel-sel ini diharapkan pembentukan sub-subseksi berdasar basis wilayah.

Untuk penguatan kaderisasi anggota dilakukan pula kursus kader (*cursusvergadering*). Perintah ini merupakan bagian dari keputusan *hoofdbestuur* PKI pada September 1924. Kursus kader dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan partai massa yang disiplin. Ini sejalan dengan pernyataan Tan Malaka yang memandang SR sebagai barisan terdepan untuk semua unsur revolusioner (Poeze, 1988: 370).

Pada fase pengembangan SR Tegal juga dilakukan pengembangan sayap pendukung bersama dengan organisasi pergerakan kebangsaan lainnya seperti sarekat buruh-sarekat buruh di Tegal. Seperti pernah dikemukakan di artikel ini, beberapa sarekat buruh di Tegal yang mendukung perjuangan SR Tegal di antaranya Sarekat Boeroeh Goela, Sarekat Pekerja Pelaboehan Laoet Tegal, Sarekat Boeroeh Tjitak Tegal, Sarekat Boeroeh Bingkil dan Electric.

Selain dukungan anggota, pengembangan organisasi SR juga disokong dari dukungan iuran anggota pada organisasi. SR Tegal telah menerapkan pembiayaan kas organisasi dari anggota. Besaran iuran disesuaikan dengan penghasilan keluarga. Iuran terkecil f. 0,15 dengan penghasilan sebesar kurang atau minimal f.20 per bulan. Sementara yang memiliki penghasilan di atas f. 300 per bulan, besaran iuran mencapai 20 % dari penghasilan (*Mailrapporten* 143/2016: 3).

**Tabel 4. Besaran Iuran Anggota SR Tegal**

Penghasilan	Besaran Iuran
< 20 f	f.0,15
f.21 s.d f.30	f.0,25
f.31 s.d f.40	f.0,35
f.41 s.d f.50	f.0.50
f.51 s.d f.100	f.0,75
f.51 s.d f. 150	f.1,25
f.151 s.d f.200	f.2,00
f.201 s.d f. 300	f.2,50
< f.300	f. 60

Sumber : *Mailrapporten* 143/1926: 3.

Hasil iuran anggota digunakan untuk menunjang kegiatan organisasi serta keperluan rutin lainnya. Contohnya adalah iuran untuk SR Keresidenan Pekalongan sebesar f.50 per bulan, honor pengurus sebanyak f. 300 per bulan. Alokasi untuk perawatan kantor dan mebelair sebesar 25 % (*Mailrapporten* 143/1926: 3-4).

### Fase Radikal (1925-1926)

Radikalisasi SR Tegal dimulai dengan gerakan protes hingga melahirkan proses perlawanan di Karangcegak pada Maret 1926. Sejumlah protes dikemukakan oleh sejumlah pengurus SR di beberapa wilayah Tegal. Pada April 1925 pimpinan SR Karangcegak, Soleman menggerakkan protes terhadap aturan *desagardoediensten*. Salah satu aturan dari *desagardoediensten* adalah mewajibkan kegiatan ronda malam untuk mengamankan ladang tebu dan kompleks pabrik gula. Dalam waktu bersamaan di Jatinegara, Haji Moeklas dan Haji Machroef Iskak pimpinan SR setempat melancarkan pembangkangan menolak pajak pasar. Pemerintah kolonial menjawabnya dengan melakukan pengawasan terhadap kedua tokoh yang dianggap menghasut dan melawan hukum.

Jelang 1926 keresahan makin meningkat. Menjawab keresahan di Karangcegak, pemerintah mengutus Wedana Adiwerna dan Asisten Wedana

Tarub ke Karangcegak. Tujuan mereka adalah meyakinkan masyarakat terhadap aturan *desagardoediensten*. Kedua pejabat didampingi enam petugas kepolisian. Mereka datang pada 1 Maret 1926 dan menginap di kediaman Kepala Desa Karangcegak.

Kehadiran aparat kepolisian menimbulkan kesalahpahaman. Ini bisa disadari karena keenam aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah-rumah penduduk yang dianggap sebagai anggota SR Karangcegak. Reaksi pun berbalas. Sekitar 200 orang bersenjatakan parang, pentungan, dan alat pemotong tebu merangsek dan mengepung kediaman rumah Kepala Desa yang digunakan sebagai tempat menginap dua pejabat. Sebenarnya mereka mencari aparat kepolisian. Sembari meneriakkan, "Allahu Akbar...Allahu Akbar...!" mereka terus mencarinya. Melihat massa yang jumlahnya banyak, aparat kepolisian mencari perlindungan dan bersembunyi di rumah seorang haji.

Atas insiden Karangcegak, Residen Pekalongan mengirimkan kawat berita permintaan bantuan keamanan untuk mengatasi huru-hara di Karangcegak. Bala bantuan didatangkan dari detasemen kepolisian di Sukabumi dan depot pelatihan kepolisian Djatinegara Batavia.

Sebenarnya pada 25 Februari 1926, terdapat protes di pasar Balamoa oleh 30 remaja setempat yang meneriakkan yel-yel antipemerintah. Patih Tegal melakukan langkah-langkah antisipasi bersama dengan Komandan Detasemen Polisi (*veldpolitie*) melakukan patroli kampung. Dampak protes tersebut mengakibatkan Kartikno pemimpin gerakan protes ditangkap. Namun, ia dibebaskan dari tuntutan hukum di pengadilan.

Pada 10 Maret 1926 aparat kepolisian yang didatangkan dari Sukabumi dan Djatinegara melakukan penangkapan dan penggerebekan di rumah-rumah terhadap pengurus dan anggota SR *lid* Karangcegak. Ada 72 anggota yang ditangkap. Dari keseluruhan anggota rata-rata mereka dijatuhi hukuman dua sampai empat tahun dan disebar ke

beberapa penjara seperti Tegal, dan terjauh sampai ke Madura (Nuh, 1959: 1-20). Kepada pimpinan dan pengurus yang dianggap mendalangi peristiwa Karangcegak dan radikalisasi SR di Djatinegara Slawi, pemerintah telah menyediakan pengasingan di Boven Digoel.

Boven Digoel menjadi catatan tersendiri dalam sejarah pergerakan nasional. Di tempat inilah pemerintah kolonial menciptakan tempat pengasingan permanen. Bersamaan dengan meletusnya pemberontakan PKI 1926 dan ancaman terhadap *rust en orde* menjadikan pemerintah melakukan serangkaian pertemuan melibatkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama *Raad van Nederlandsch Indie*. Digoel resmi dinisbatkan sebagai tempat pengasingan pada 10 Desember 1926.

Para tokoh SR Tegal diberangkatkan ke Boven Digoel sebagai angkatan pertama Digulis pada 1927. Mereka adalah Kjai Muklas (register tahanan 573), Haji Makroef Iskak (register tahanan 572), Soeleman Djamprong (register tahanan 568), Soewirjo (register tahanan 576), Moeslim (register tahanan 571), Joesoef (register tahanan 569), Soemarti Darnoprawono (register tahanan 183), dan Dradjat (register tahanan 580).

Pada daftar tahanan yang di-Bovendigulkan, satu-satunya tahanan politik perempuan adalah Soemarti Darnoprawono. Ia diketahui merupakan propagandis SR sekaligus pengurus PKI Tegal yang beralamatkan di Kraton Barat. Soemarti tiba di Boven Digoel pada 16 Maret 1927 dan dibebaskan pada 1932.

Perlu dicatat pula, bahwa mereka yang diasingkan oleh pemerintah kolonial, bukan hanya mereka yang menjadi anggota SR Tegal, tetapi juga mereka yang memiliki keanggotaan dalam VSTP dan PKI.

Kelak pada awal pendudukan Jepang, tepatnya pada 1943, dua orang tahanan politik dari SR Tegal bersama dengan 500 orang tapol Digoel, diterbangkan ke Cowra Australia. Dua

orang itu masing-masing Kjai Moeklas dan Soeleman Djiamporong.

Nasib naas dialami Soewirjo yang berasal dari Mangkukusuman. Karena sikap politiknya ia dipindahkan ke Tanah Tinggi. Soeleman Djiamporong tiba di Boven Digoel pada 31 Oktober 1927. Soeleman diketahui tewas tertembus panah oleh masyarakat setempat dan dikebumikan di Digoel.

Pascaperlawanan SR Karangcegak, sejumlah anggota SR Tegal mengembalikan kartu keanggotaan kepada aparat kepolisian. Efek penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian menjadi alasannya. Berikut jumlah pengembalian kartu keanggotaan SR Tegal tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5. Jumlah Pengembalian Kartu Keanggotaan SR Tegal**

No.	Distrik	Keanggotaan SR	Kartu yang Dikembalikan
1.	Tegal	660	214
2.	Soeradadi	359	340
3.	Adiwerna	676	346
4.	Slawi	1.503	1.306
5.	Pangkah	323	140
6.	Balapoelang	398	41
7.	Boemidjawa	12	12
8.	Djatinegara	1396	1.113
	<b>Total</b>	<b>5.327</b>	<b>3.512</b>

Sumber: *Mailrapporten 427/ 1926*: 31.

## AKHIR DARI PEMBERONTAKAN

Perlawanan SR lid Karangcegak dan SR Tegal dapat dikatakan pemberontakan yang abortus, walaupun ini bukan pemberontakan yang terakhir bagi kaum kiri. Pada 22 Agustus 1926, setelah pelaksanaan Konferensi Prambanan diselenggarakan pertemuan di Tegal yang dihadiri komisaris daerah PKI Tegal, Abdul Munthalib, dan Suwirdjo, Sastrosuwirjo dari Cirebon, dan utusan dari Pekalongan (Latief, 2014: 128). Hasil pertemuan menyepakati hasil Konferensi

Prambanan dan mempersiapkan diri untuk segera membentuk Komite Pemberontak (Latief, 2014: 128). Bahkan gerakan kiri Tegal, khususnya komisaris daerah PKI Tegal menyerukan kepada *hoofdbestuur* PKI Tegal untuk tidak menunda perlawanan, serta menyerukan kepada pimpinan PKI di wilayah pesisir pantura untuk mendukung jalannya pemberontakan yang bertujuan melenyapkan orang-orang Eropa serta beberapa pejabat pemerintah (Mcvey, 2010: 579). Mereka menetapkan dimulainya pemberontakan pada 28 September 1926. Bagi cabang yang ragu agar dipaksa untuk bergabung. Polemik ini menghangat, mengingat belum lama berselang, perlawanan SR Tegal berhasil diberangus oleh pemerintah kolonial. Disiplin partai dan kondisi riil menjadi alasan dari mereka yang menolak pilihan revolusioner.

Tanda dimulainya pemberontakan adalah letusan kembang api yang dinyalakan di suatu tempat yang saat ini menjadi alun-alun kota Tegal. Namun pihak aparat telah mengetahui informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PKI Tegal. Kembang api simbol dimulainya gerakan revolusioner tidak pernah terjadi di Tegal. Menurut Mcvey (2010: 491), pemberontakan Tegal secara harfiah mati pada saat lahir dan Hindia Belanda untuk sementara terhindar dari revolusi.

Sama seperti perlakuan terhadap aktor perlawanan SR Tegal, para aktor kaum kiri di Tegal segera beroleh balasannya. Sebanyak tujuh orang diberangkatkan ke Boven Digoel dalam dua tahap yakni tahun 1928 (enam orang) dan 1929 (satu orang). Ketujuh orang tersebut adalah Soetarno alias Wresa (register tahanan 833), Samad alias Ardhie (register tahanan 883), Roestab bin H.Dulgani (register tahanan 1092), Wadjat alias Sastro (register tahanan 885), Sangid Wasngad (register tahanan 890), Syatori (register tahanan 891), dan Soeleman Darmoprawiro (register 1.299).

## SIMPULAN

Kelahiran dan eksistensi SR Tegal tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi khususnya dampak kapitalisme perkebunan awal abad XX. Keterbukaan yang diberikan pemerintah kolonial melalui penetapan UU Agraria dan UU Gula, membawa pengaruh bagi masuknya pengelolaan industri perkebunan oleh kalangan partikelir. Ini yang membedakan dengan sistem *cultuurstelsel*. Perubahan yang signifikan ialah intensitas arus permodalan, eksploitasi secara massif dalam penyediaan lahan dan tenaga kerja, serta arus modernisasi dari konsekuensi industrialisasi perkebunan.

Dampak negatif dari kapitalisme perkebunan ialah adanya sejumlah aturan yang menekan dan berakibat pada perlawanan. Di antaranya adalah aturan *desagardoediensten* yang mewajibkan penduduk desa melakukan tugas ronda malam menjaga ladang tebu dan kompleks pabrik gula dari ancaman perusakan dan pembakaran tebu.

SR Tegal lahir dari hubungan yang tidak sinkron dari kondisi negatif keberadaan kapitalisme perkebunan. SR Tegal mewakili tipikal gerakan perlawanan dan sentimen antikolonial. Rasa ketidakpuasan dari kebijakan sektor perkebunan khususnya industri gula, membuahakan harapan besar masyarakat desa terhadap SR. Oleh karenanya basis keanggotaan SR Tegal berada di wilayah pedesaan.

Ada beberapa hal yang patut dikemukakan dari faktor-faktor yang memengaruhi pesatnya pertumbuhan organisasi SR Tegal. *Pertama*, dukungan dari sayap organisasi lainnya seperti sarekat buruh yang berada di Tegal. *Kedua*, sistem rekrutmen dan kaderisasi keanggotaan yang melalui sistem terbuka dan tertutup. *Ketiga*, tokoh-tokoh kunci yang memiliki nilai kharismatik, seperti ditunjukkan dari ketokohan Kjai Moeklas dan Kjai Machroef Iskak, pimpinan SR Karangcegak. *Kedua* tokoh tersebut dikenal

sebagai tokoh agama serta pemimpin pergerakan kebangsaan.

Pertumbuhan SR Tegal dapat dikatakan relatif singkat. Dari periode singkat tersebut SR telah menjejakkan sikap perlawanan terhadap Pemerintah kolonial. Dengan jumlah keanggotaan yang cukup banyak, yakni sebesar 5.327 orang, SR adalah ancaman bagi stabilitas kolonial yang tercakup pada filosofi *rust en orde*.

Puncak radikalisasi SR Tegal adalah perlawanan Karangcegak pada Maret 1926 yang berakhir dengan pemberangusan organisasi tersebut oleh pemerintah kolonial.

Terdapat beberapa alasan yang menjadikan kegagalan perlawanan SR Tegal, yaitu: *pertama*, militansi ideologis yang tidak sinkron dengan karakteristik basis keanggotaan yang rata-rata masyarakat agraris/ pedesaan; *kedua*, ketergantungan pada tokoh-tokoh kunci pimpinan SR setempat; *ketiga*, garis ideologis radikal revolusioner tidak sesuai dengan kondisi karakteristik masyarakat pedesaan; *keempat*, disiplin partai yang tidak ditaati oleh anggota maupun pengurus; *kelima*, tekanan pemerintah dalam mengawasi potensi radikalisasi pergerakan kebangsaan; dan *keenam*, pertentangan di antara pengurus tentang artikulasi SR sebagai partai kader kepada partai massa.

Belajar dari pertumbuhan SR Tegal, khazanah historiografi di Indonesia diperkaya adanya studi gerakan radikal yang dimainkan organisasi pergerakan kebangsaan. Sebagai peristiwa sejarah, radikalisasi SR Tegal pada 1926 mengejawantahkan nilai-nilai radikal sebagai ekspresi perlawanan, walau perlawanan itu bak musim bunga yang datangnya sekejap.

## REFERENSI

Alamsyah (2003). "Perkembangan Perkebunan dan Pelabuhan di Karesidenan Tegal 1830-1900". Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

- ANRI (1927). "Bevolking Register der Geïnterneerden No.100 dan No.101".
- Archief National Den Haag (1926). "Mailrapporten No. 397/ 1926: Surat Residen Pekalongan Jasper kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda", tanggal 23 Maret 1926"
- Archief National Den Haag (1926). "Mailrapporten No.143/1926 : De Communistische Beweging in de Residentie Pekalongan voor en na de beperking van het vergaderecht", tanggal 24 Januari 1926.
- Archief National Den Haag (1926). "Mailrapporten No.427/ 1926: Rapport betreffende de door communisten in de afdeeling Tegal veroorzaakte ongeregeldeheden", tanggal 26 Maret 1926.
- Arsip Perpustakaan Nasional (1919). "Notulen van vergadering gehouden op den 18-en Februari 1919".
- Arsipnas (1973). *Memori Serah Terima Jabatan 1923-1930*. Jakarta: Arsipnas, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah.
- Bloembergen, Marieke (2011). *Polisi Hindia Belanda: Dari Keperdulian dan Ketakutan*, terjemahan Tristan P. Moeliono. Jakarta: Gramedia.
- Burger, D.H. (1983). *Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, terjemahan Sudjito Sosrodihardjo. Jakarta: Bhratara.
- Cribb, Robert Bridson (2000). *Historical Atlas of Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Daryono (2008). *Stad Tegal: Evolusi Sebuah Kota*. Tegal: Kantor Informasi dan Kehumasan Tegal.
- Echool, John M. dan Hasan Shadily (2007). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Elson, R.E. (1984). *Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in East Java Residency 1830-1940*. Singapore: Oxford University Press and Asian Studies Association of Australia.
- Furnivall, J. S. (2009). *Hindia Belanda: Studi Ekonomi Majemuk*, terjemahan Samsudin Barlian. Jakarta: Freedom Institute.
- Gelderen, J. (1961). "The Economic of the Tropical Colony" dalam *Indonesian Economies The Concept of Dualism in Theory and Policy*, Den Haag : Van Hoeve.
- Knight, G. R. (2002). "Apakah Ketergantungan yang Sungguh-sungguh ? Industri Gula di Jawa 1880-1942" dalam Thomas J.Lindblad (Ed). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, terjemahan S. Nawianto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM.
- Latief, Busjarie (2014). *Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI (1920-1965)*. Bandung: Ultimus.
- Lindblad, T. J. (ed.). (2002). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, terjemahan S. Nawianto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM.
- Lucas, Anton (1991). *One Soul One Struggle: Region and Revolution in Indonesia*. Sidney: Allen and Unwin.
- Madison, Angus dan G.E. Prince (1989). *Economic Growth in Indonesia 1820-1942*. Leiden: Dordrecht Holland Foris Publication-KITLV.
- Mcvey, Ruth (2010) *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Neratja*, edisi 23 November 1918.
- Neratja*, edisi 30 Maret 1921.
- Nuh, Mohammad (1962). "Daftar Nama-nama Perintis Kemerdekaan dalam Periode 1908-1945 dengan Sejarah Singkatnja". Naskah ketikan tangan.
- Poeze, Hary A. (1988). From Foe to Partner to Foe Again: The Strange of the Dutch Authorites and Digoel Exile in Australia 1943-1945. *Indonesia*, Edisi 94.
- Shiraishi, Takashi (1998). *Zaman Bergerak: Radikalisasi di Jawa 1912-1926*, terjemahan Hilmar Faried. Jakarta: Grafiti Pers.

- Shiraishi, Takashi (2001). *Hantu Digoel : Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial*, terjemahan Endi Haryono. Yogyakarta: LKIS.
- Sulistiyono, Singgih Tri (2009).” Pelabuhan Niaga Tegal : Tinjauan Historis dan Perspektif Ekonomi Kelokalan dalam Mewujudkan Integrasi Pembangunan Berbasis Maritim”, makalah *Diskusi Pengembangan Pelabuhan Tegal oleh Lembaga Nalar Terapan (LeNTera)*, Tegal 24 Desember 2009.
- SI Tetap*, Juli 1920.
- SI Tetap*, Juni 1918.
- Simbolon, Parakitri Tahi (*Peny*) (1995). *Menjadi Indonesia Buku I: Akar-akar Kebangsaan* Jakarta: Kompas.
- Sinar Hindia*, 18 Juni 1924.
- Sinar Hindia*, 20 Juni 1924.
- Sinar Hindia*, 21 Juni 1924.
- Sinar Hindia*, 5 Juni 1924.
- Sinar Hindia*, 5 Mei 1918.
- Soe Hok Gie (1990). *Di Bawah Lentera Merah : SI Semarang 1917-1922*. Jakarta : Franz Fanon.
- Soedjono, Imam (2006) *Yang Berlawanan : Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, Yogyakarta: Resist Book.
- Wiradi (2000). *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Institute for Social Transformation Press.